



DINAMIKA PARTAI POLITIK SEBAGAI GATEKEEPER DALAM MEMENUHI KUOTA PEREMPUAN DI JAWA BARAT

Rafih Sri Wulandari¹, Zaini Uzlah², Siti Mulyati³

^{1,2,3} Ilmu Pemerintahan, STISIP Guna Nusantara Cianjur

*Corresponding author: Rafihwulan12@gmail.com

Informasi Artikel:

Terima: 12-03-2026

Revisi: 18-03-2026

Disetujui: 02-04-2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan affirmative action dalam pemenuhan kuota perempuan pada PDI Perjuangan di Provinsi Jawa Barat. Isu ini menjadi krusial karena adanya kesenjangan yang lebar antara pemenuhan kuota administratif dan hasil elektoral nyata yang masih rendah di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif metode studi kasus dan kerangka teori Merilee S. Grindle, penelitian ini mengevaluasi interaksi antara isi kebijakan (*content of policy*) dan konteks implementasi (*context of implementation*) dalam internal partai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum optimal akibat pengambilan keputusan yang cenderung sentralistik serta dominasi elite partai sebagai gatekeeper yang membatasi ruang strategis bagi kader perempuan. Kebijakan afirmasi lebih banyak dipahami sebagai kewajiban administratif demi memenuhi regulasi pemilu dibandingkan sebagai instrumen transformasi politik substantif, sehingga sering terjebak dalam praktik tokenisme. Hambatan signifikan lainnya mencakup kuatnya pengaruh budaya patriarki, stereotip gender, serta minimnya dukungan operasional berupa pendidikan politik dan pendanaan yang berkelanjutan di tingkat lokal. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada komitmen pimpinan lokal dan reformasi internal partai yang inklusif agar keterwakilan perempuan tidak hanya bersifat simbolik, melainkan mampu memberikan dampak nyata dalam pengambilan keputusan politik.

Kata Kunci: *Affirmative Action*, PDI Perjuangan, Representasi Perempuan

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of the affirmative action policy in fulfilling the women's quota within PDI Perjuangan in West Java Province. This issue is crucial due to the wide gap between the fulfillment of administrative quotas and the actual electoral results, which remain low in the field. Utilizing a qualitative approach with a case study method and Merilee S. Grindle's theoretical framework, this research evaluates the interaction between the content of policy and the context of implementation within the party. The research findings indicate that policy implementation has not been optimal due to decision-making that tends to be centralized, as well as the dominance of party elites acting as gatekeepers who limit the strategic space for female cadres.



Affirmative policies are largely understood as an administrative obligation to comply with electoral regulations rather than as an instrument for substantive political transformation, often trapping them in the practice of tokenism. Other significant barriers include the strong influence of patriarchal culture, gender stereotypes, and the lack of operational support in the form of political education and sustainable funding at the local level. The study concludes that the success of this policy heavily relies on the commitment of local leaders and inclusive internal party reform so that women's representation is not merely symbolic, but capable of making a real impact on political decision-making.

Keywords: *Affirmative Action, PDI Perjuangan, Women's Representation*

PENDAHULUAN

Isu kesetaraan gender dalam politik Indonesia menjadi krusial karena representasi perempuan terbukti meningkatkan kualitas kebijakan publik dan kepercayaan masyarakat. Studi menunjukkan bahwa kehadiran perempuan di legislatif berkontribusi positif terhadap pelayanan publik dan efektivitas komunikasi politik (Aryani et al., 2023). Kebijakan affirmative action melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 mendorong kuota 30% perempuan, namun implementasinya masih menghadapi hambatan struktural dan budaya, khususnya di Jawa Barat (Wulandaria et al., 2024). Secara global, efektivitas representasi perempuan dipengaruhi konteks institusional dan kualitas demokrasi (Kim, 2022). Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan, edukasi publik, dan adaptasi strategi lokal agar affirmative action tidak bersifat simbolik, melainkan menghasilkan partisipasi politik perempuan yang substantif dan berkelanjutan (Islam et al., 2025).

Fenomena keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia menunjukkan kesenjangan antara pemenuhan kuota administratif dan hasil elektoral yang masih rendah. Secara struktural, sistem rekrutmen partai politik belum transparan dan didominasi elite, sehingga membatasi peluang kader perempuan. Secara kultural, stereotip gender dan norma patriarki termasuk dalam konteks masyarakat Muslim menghambat dukungan terhadap kepemimpinan perempuan. Di Indonesia, interaksi faktor kelembagaan dan budaya ini menciptakan hambatan ganda dalam implementasi kebijakan afirmatif. Meskipun perempuan legislatif berperan dalam mobilisasi partisipasi politik, upaya tersebut sering terbentur norma sosial yang konservatif. Oleh karena itu, peningkatan representasi perempuan memerlukan reformasi sistem rekrutmen, penguatan kapasitas kader, serta perubahan paradigma sosial dan kelembagaan agar kebijakan kuota tidak hanya bersifat simbolik (Goyal, 2023).

Partai politik berperan strategis sebagai gatekeeper dalam rekrutmen politik yang menentukan akses partisipasi (Ibrahim et al., 2024). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan secara normatif telah berkomitmen pada kesetaraan gender, namun implementasi kebijakan afirmatif di tingkat lokal masih menghadapi tantangan sosial-budaya (Caravantes & Lombardo, 2024). Di Jawa Barat, heterogenitas masyarakat memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut.

Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi formal belum menjamin praktik yang setara akibat hambatan struktural dan kultural (Sawer, 2024;Setiadi et al.,2025). Oleh karena itu, diperlukan inovasi demokrasi feminis dan adaptasi kebijakan kontekstual untuk mendorong partisipasi perempuan secara substantif. Peningkatan representasi perempuan juga terbukti memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Gap penelitian terletak pada minimnya studi yang mengkaji implementasi kebijakan afirmatif perempuan di tingkat partai politik secara kontekstual. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek normatif dan kuantitatif, tanpa menggali dinamika internal organisasi (Yulivestra et al.,2025). Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menggunakan teori Merilee S. Grindle yang menekankan interaksi antara isi kebijakan dan konteks implementasi. Pendekatan ini relevan untuk memahami pengaruh struktur partai dan budaya lokal terhadap keberhasilan kebijakan. Studi sebelumnya juga menunjukkan pentingnya faktor konteks lokal dalam implementasi kebijakan publik, seperti pada kasus Sumatera Barat dan Aceh Utara(Hasyem et al.,2022).

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memastikan bahwa kebijakan affirmative action tidak berhenti pada tataran simbolik atau administratif semata, melainkan mampu diimplementasikan secara substantif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan studi implementasi kebijakan publik, serta kontribusi praktis bagi partai politik dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mendorong kesetaraan gender dalam politik, khususnya di tingkat lokal.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Kesetaraan Gender (*Gender Equality Theory*)

Teori kesetaraan gender menegaskan bahwa rendahnya keterwakilan perempuan bukan disebabkan oleh keterbatasan kapasitas individu, melainkan akibat konstruksi sosial dan ketimpangan struktural seperti norma patriarki, stereotip gender, dan sistem kelembagaan yang diskriminatif(Kim, 2022). Kehadiran perempuan di legislatif tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga berdampak pada peningkatan kesetaraan hukum dan peluang ekonomi dalam konteks institusional tertentu. Dukungan terhadap kesetaraan gender juga dipengaruhi oleh ideologi politik dan nilai sosial masyarakat (Sevincer et al., 2023). Selain itu, ketimpangan struktural memperkuat bias, termasuk penyebaran misinformasi terhadap politisi perempuan (Ahmed et al.,2025). Pendekatan representasi feminis menekankan pentingnya inklusivitas dan responsivitas. Oleh karena itu, diperlukan perubahan struktural, kultural, dan kebijakan yang komprehensif untuk mewujudkan kesetaraan gender yang substantif.

Teori Representasi Politik (*Political Representation Theory*)

Teori Representasi Politik menjelaskan bagaimana wakil rakyat memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui dua konsep utama, yaitu *descriptive representation* dan *substantive representation*. *Descriptive representation* merujuk pada keterwakilan perempuan secara

proporsional dalam lembaga legislatif, yang penting untuk mencerminkan struktur sosial dan meningkatkan legitimasi demokrasi (Funk & Hinojosa, 2023). Namun, tidak semua perempuan memiliki kepentingan yang sama, sehingga pengalaman bersama menjadi faktor penting dalam menghubungkan representasi deskriptif dengan representasi substantif (Xydias, 2023). Sementara itu, *substantive representation* menekankan peran aktif perempuan dalam menghasilkan kebijakan yang responsif terhadap isu gender, seperti kesehatan dan kesejahteraan sosial, meskipun efektivitasnya bergantung pada konteks politik dan sosial (Mechkova & Edgell, 2023). Hubungan keduanya bersifat dinamis, di mana jumlah perempuan yang memadai dapat mendorong efektivitas peran substantif, meskipun tetap dipengaruhi faktor kelembagaan dan tantangan seperti marginalisasi dan kekerasan politik (Itzkovitch-Malka & Oshri, 2024).

Teori Partai Politik sebagai *Gatekeeper*

Teori partai politik sebagai *gatekeeper* menekankan peran partai sebagai pengendali utama akses dalam rekrutmen politik, menentukan siapa yang dapat berpartisipasi dan menduduki posisi strategis (Parvez et al., 2024). Mekanisme seleksi kandidat yang cenderung eksklusif dan elitistik sering kali dipengaruhi oleh kepentingan internal serta loyalitas terhadap elite. Dominasi elite partai memperkuat kontrol atas sumber daya dan keputusan politik, sehingga berpotensi menghambat keberagaman. Dalam konteks gender, akses perempuan kerap terbatas akibat hambatan struktural dan budaya dalam partai. Oleh karena itu, diperlukan reformasi internal partai yang lebih inklusif dan demokratis untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik (Desmond, 2024)

Teori Budaya Politik (*Political Culture Theory*)

Teori Budaya Politik menekankan bahwa nilai, norma, dan budaya masyarakat membentuk perilaku politik, termasuk partisipasi perempuan. Budaya patriarki menempatkan laki-laki sebagai dominan, sehingga perempuan sering dianggap kurang layak memimpin. Stereotip gender menciptakan dilema bagi perempuan politisi, karena perilaku mereka dinilai berdasarkan ekspektasi maskulin atau feminin (Rohrbach, 2024). Bias ini juga memengaruhi penilaian pemilih dan membatasi peluang perempuan dalam politik. Selain itu, norma budaya dan agama konservatif memperkuat subordinasi perempuan serta dapat melegitimasi ketimpangan bahkan kekerasan berbasis gender ((Lomazzi, 2023). Meskipun terdapat upaya melalui kebijakan kuota, budaya politik yang masih patriarkal dan praktik *gatekeeping* partai tetap menjadi hambatan (Frech, 2024). Oleh karena itu, perubahan budaya dan norma sosial menjadi kunci dalam mendorong politik yang inklusif dan setara gender.

Teori demokrasi inklusif dan feminis

Teori demokrasi inklusif dan feminis menekankan bahwa demokrasi yang berkualitas harus menjamin representasi dan partisipasi setara bagi kelompok marginal, khususnya perempuan, tidak hanya secara prosedural tetapi juga substantif. Pendekatan ini mengintegrasikan perspektif interseksional yang mempertimbangkan faktor seperti ras, kelas,

dan identitas sosial dalam partisipasi politik (Sanbonmatsu et al., 2025). Perkembangan feminisme digital menunjukkan peran media dalam memperluas ruang advokasi kesetaraan gender, meskipun masih menghadapi ketimpangan akses (Yin & Sun, 2021). Selain itu, demokrasi feminis menuntut transformasi struktur patriarki melalui aksi kolektif dan reformasi kebijakan yang inklusif (Martínez-Ariño, 2024). Implementasi kesetaraan gender juga memerlukan komitmen kelembagaan yang kuat agar tidak bersifat simbolik (Tardos, et al., 2025). Dengan demikian, demokrasi inklusif feminis mendorong perubahan sistemik yang mengakui keberagaman dan memperkuat posisi perempuan dalam pengambilan keputusan politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan fenomena secara mendalam dalam konteks nyata, khususnya untuk menjawab pertanyaan “how” dan “why” terkait implementasi kebijakan affirmative action (Wulandaria et al., 2024; Setiadi et al., 2025). Penelitian ini menggunakan desain studi kasus tunggal (single case study), karena kasus yang diteliti bersifat kritis dan representatif dalam menggambarkan dinamika implementasi kebijakan afirmatif di tingkat daerah. Fokus penelitian berada pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jawa Barat. Partai ini dipilih karena memiliki komitmen terhadap keterwakilan perempuan, struktur organisasi yang kuat, serta pengalaman kaderisasi perempuan. Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan afirmatif dalam proses rekrutmen dan pencalonan legislatif perempuan, termasuk dinamika internal yang memengaruhinya.

Desain penelitian bersifat embedded, dengan beberapa unit analisis, yaitu: (1) struktur dan kebijakan internal partai terkait afirmasi, (2) pengalaman kader perempuan, (3) sikap elite partai, dan (4) interaksi partai dengan institusi eksternal seperti penyelenggara pemilu dan masyarakat sipil. Desain ini memungkinkan analisis yang komprehensif antara kebijakan formal dan praktik di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara (Setiadi et al., 2025) mendalam dengan pengurus partai dan kader perempuan, studi dokumen seperti AD/ART dan pedoman pencalonan, serta observasi partisipatif dalam kegiatan partai. Analisis data menggunakan pendekatan tematik melalui proses koding, kategorisasi, dan penarikan pola hubungan antar-tema. Validitas dan reliabilitas dijaga melalui triangulasi data, member check, penggunaan protokol studi kasus, serta audit trail (Janis, 2022). Analisis mengacu pada teori implementasi kebijakan dan representasi politik untuk memahami kesesuaian antara desain kebijakan dan realitas implementasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kondisi content of policy dalam implementasi kebijakan affirmative action oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jawa Barat menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan masih belum optimal, terutama pada aspek derajat perubahan (extent of change) dan komitmen sumber



daya (resources committed). Dari sisi kepentingan yang terdampak (interest affected), pengambilan keputusan dalam partai cenderung bersifat sentralistik, sehingga kelompok perempuan sebagai pihak yang seharusnya diuntungkan belum sepenuhnya memiliki ruang strategis dalam menentukan arah kebijakan. Pada aspek manfaat kebijakan (type of benefit), partai politik sebagai pelaksana belum mampu memaksimalkan peluang afirmatif untuk mendorong perempuan menjadi anggota legislatif secara substantif. Kebijakan yang ada lebih banyak dipahami sebagai kewajiban administratif dibandingkan sebagai instrumen transformasi politik. Sementara itu, pada aspek derajat perubahan (extent of change), meskipun secara formal kebijakan afirmatif telah diimplementasikan sesuai regulasi, praktik di lapangan menunjukkan masih kuatnya pengaruh budaya patriarki serta lemahnya sistem pendidikan politik bagi kader perempuan yang cenderung bersifat temporer dan hanya intens menjelang pemilu.

Dari sisi pelaksana program (program implementors), baik pemerintah daerah maupun struktur partai belum menjalankan program pembinaan dan pendidikan politik secara konsisten dan terstruktur. Hal ini mengindikasikan lemahnya perencanaan jangka panjang dalam penguatan kapasitas perempuan. Selain itu, dalam aspek lokasi pengambilan keputusan (site of decision making), penentuan calon legislatif belum sepenuhnya didasarkan pada analisis elektabilitas yang objektif, melainkan masih dipengaruhi pertimbangan subjektif elite partai. Keterbatasan juga terlihat pada aspek sumber daya (resources committed), di mana ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten masih rendah. Meskipun terdapat bidang khusus perempuan dalam struktur partai, dukungan nyata untuk meningkatkan partisipasi perempuan masih minim. Tidak adanya mekanisme pengawasan khusus terhadap proses rekrutmen perempuan menunjukkan bahwa pemenuhan kuota 30% masih bersifat formalitas.

Selain content of policy, faktor context of implementation juga sangat memengaruhi keberhasilan kebijakan. Dari aspek kekuasaan dan kepentingan aktor (power, interest, and strategy of actors involved), implementasi kebijakan masih dipengaruhi oleh kepentingan internal dan dominasi elite partai. Pada aspek karakteristik kelembagaan (institution and regime characteristic), pemerintah daerah belum berperan optimal dalam menyediakan regulasi teknis yang jelas, sementara proses seleksi di tingkat partai masih kurang transparan. Namun demikian, pada aspek kepatuhan (compliance and responsiveness), pelaksana kebijakan relatif telah menjalankan tugas sesuai ketentuan, meskipun belum mencapai efektivitas substantif. Kesenjangan antara kebijakan normatif dan implementasi nyata juga terlihat dari minimnya petunjuk teknis di tingkat daerah. Instruksi pusat terkait kuota perempuan tidak diiringi dengan dukungan operasional seperti pembinaan dan pendanaan, sehingga implementasi di daerah cenderung bersifat administratif. Peran elite partai menjadi faktor penentu utama, di mana komitmen pimpinan lokal sangat memengaruhi keberhasilan afirmasi. Perbedaan orientasi elite menyebabkan variasi implementasi antar daerah.

Faktor sosial-kultural juga menjadi hambatan signifikan. Budaya patriarki di masyarakat masih membatasi partisipasi perempuan, baik melalui stereotip gender maupun rendahnya dukungan sosial. Selain itu, sistem pemilu yang kompetitif menuntut sumber daya finansial dan jaringan politik yang kuat, yang seringkali lebih dimiliki oleh kandidat laki-laki. Kondisi ini



menciptakan ketimpangan dalam kompetisi politik. Praktik tokenisme juga ditemukan, di mana perempuan hanya dijadikan pelengkap untuk memenuhi kuota tanpa diberikan ruang pengambilan keputusan. Namun demikian, terdapat beberapa praktik baik di tingkat lokal yang menunjukkan bahwa implementasi afirmasi dapat berjalan efektif jika didukung komitmen elite dan program kaderisasi yang berkelanjutan. Secara teoretis, pendekatan Merilee S. Grindle terbukti relevan dalam menjelaskan dinamika implementasi kebijakan ini. Namun, untuk memahami secara lebih komprehensif, diperlukan integrasi dengan teori kelembagaan, relasi gender, serta patronase politik. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya menguatkan teori implementasi kebijakan, tetapi juga memperkaya pemahaman tentang kompleksitas politik afirmatif di tingkat lokal Indonesia.

Pembahasan

Implementasi kebijakan affirmative action atau tindakan afirmatif bagi perempuan di PDI Perjuangan Jawa Barat masih menghadapi tantangan besar antara pemenuhan administratif dan hasil elektoral yang nyata. Hambatan struktural utama terletak pada peran partai politik sebagai gatekeeper atau penjaga pintu yang menentukan akses partisipasi politik. Penelitian oleh Ibrahim et al. (2024) menegaskan bahwa partai memegang kendali penuh atas rekrutmen, namun mekanisme yang elitistik dan sentralistik sering kali membatasi keberagaman gender dan akses perempuan terhadap posisi strategis. Selain faktor struktur, norma patriarki dan stereotip gender menjadi penghambat kultural yang signifikan, terutama di daerah dengan heterogenitas masyarakat seperti Jawa Barat. Goyal (2023) menyoroti bagaimana konteks masyarakat Muslim dan nilai-nilai sosial konservatif dapat menghambat dukungan terhadap kepemimpinan perempuan. Di lapangan, hal ini mengakibatkan kebijakan afirmatif sering kali hanya dipahami sebagai kewajiban administratif demi memenuhi regulasi pemilu, bukan sebagai instrumen transformasi politik yang substantif. Kondisi ini diperkuat oleh temuan Rohrbach (2024) bahwa politisi perempuan sering kali dinilai secara bias berdasarkan ekspektasi maskulin atau feminin. Secara teoretis, terdapat kesenjangan antara representasi deskriptif (pemenuhan kuota jumlah) dan representasi substantif (kualitas peran dalam kebijakan). Meskipun kuota 30% diupayakan terpenuhi, praktik tokenisme masih ditemukan, di mana kader perempuan hanya dijadikan pelengkap syarat pencalonan tanpa diberikan ruang pengambilan keputusan yang nyata. Funk & Hinojosa (2023) menekankan bahwa keterwakilan proporsional penting untuk legitimasi demokrasi, namun efektivitasnya sangat bergantung pada dukungan kelembagaan dan konteks politik lokal. Berdasarkan teori Merilee S. Grindle, keberhasilan kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh interaksi antara content of policy (isi kebijakan) dan context of implementation (konteks implementasi). Minimnya dukungan operasional seperti pembinaan berkelanjutan dan pendanaan di tingkat daerah menyebabkan implementasi di PDI Perjuangan Jawa Barat cenderung bersifat formalitas. Penelitian Hasyem et al. (2022) mendukung fakta bahwa faktor konteks lokal dan komitmen elite partai merupakan penentu utama keberhasilan kebijakan publik di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan reformasi internal partai yang lebih inklusif untuk mewujudkan kesetaraan gender yang substantif



KESIMPULAN

Implementasi kebijakan affirmative action pada PDI Perjuangan di Jawa Barat masih menunjukkan kesenjangan yang lebar antara pemenuhan syarat administratif dan realitas politik yang substantif,. Secara normatif, partai telah berupaya menjalankan regulasi sesuai ketentuan, namun dalam praktiknya, keterwakilan perempuan sering kali masih bersifat simbolik atau sekadar formalitas. Hambatan utama yang ditemukan bersifat ganda, yakni struktural dan kultural. Dari sisi struktural, sistem rekrutmen internal yang belum transparan serta dominasi elite partai sebagai gatekeeper membatasi akses kader perempuan untuk menduduki posisi strategis,. Pengambilan keputusan yang bersifat sentralistik menyebabkan perempuan belum sepenuhnya memiliki ruang dalam menentukan arah kebijakan partai. Secara kultural, kuatnya budaya patriarki dan stereotip gender di masyarakat menjadi tantangan besar dalam memenangkan dukungan publik bagi pemimpin perempuan. Berdasarkan kerangka teori Merilee S. Grindle, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada komitmen sumber daya dan dukungan operasional di tingkat lokal. Tanpa adanya reformasi sistem rekrutmen yang inklusif, pendidikan politik yang berkelanjutan, serta transformasi paradigma sosial, kebijakan afirmasi ini akan terus terjebak dalam praktik tokenisme,. Oleh karena itu, diperlukan komitmen kelembagaan yang kuat agar perempuan dapat berperan secara nyata dalam pengambilan keputusan politik yang responsif gender.

REFERENSI

- Ahmed, Saifuddin, Masood, Muhammad, & Ting, Adeline Bee Wei. (2025). Believing the Untrue: How Social Media, Sexism, and Structural Gender Inequality Influence Misinformation About Women Politicians. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 102(2), 450–475. <https://doi.org/10.1177/10776990251313756>
- Aryani, Y. Anni, Gantowati, Evi, Nurrahmawati, An, Arifin, Taufiq, & Sutaryo, Sutaryo. (2023). Women's political representation in local government: Its impact on public service quality. *Corporate Governance and Organizational Behavior Review*, 7(3, special issue), 375. <https://doi.org/10.22495/cgobrv7i3sip12>
- Caravantes, Paloma, & Lombardo, Emanuela. (2024). Feminist democratic innovations in policy and politics. *Policy & Politics*, 52(2), 177–199. <https://doi.org/10.1332/03055736y2023d000000009>
- Desmond, Hugh. (2024). Gatekeeping should be conserved in the open science era. *Synthese*, 203(5). <https://doi.org/10.1007/s11229-024-04559-2>
- Frech, Elena. (2024). Gendered EUropean careers? Representation and the challenges in women's political careers. *European Union Politics*, 26(1), 3–22. <https://doi.org/10.1177/14651165241300281>
- Funk, Kendall D., & Hinojosa, Magda. (2023). Descriptive Presentation: Invoking Identity as a Claim for Descriptive Representation. *Politics & Gender*, 19(4), 1245–1250.



<https://doi.org/10.1017/s1743923x22000563>

- Goyal, Tanushree. (2023). Representation from Below: How Women's Grassroots Party Activism Promotes Equal Political Participation. *American Political Science Review*, 118(3), 1415-1430. <https://doi.org/10.1017/s0003055423000953>
- Hasyem, Muhammad, Larasati, Endang, Suwitri, Sri, & Warsono, Hardi. (2022). Implementation of Distribution and Determination of Village Funds (Case Study in Syamtalira Bayu, Aceh Utara Regency). *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 10(2), 527. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v10i2.738>
- Ibrahim, Ibrahim, Haryadi, Dwi, & Hidayat, Novendra. (2024). The manipulation of identity politics in Indonesian electoral democracy today: Between regulations and practices. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(7), 4211. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i7.4211>
- Islam, Ranjita, Ali, Muhammad, & French, Erica. (2025). Enhancing women's representation in information technology through gender equality policies: A qualitative comparative analysis. *European Management Journal*. <https://doi.org/10.1016/j.emj.2025.03.003>
- Itzkovitch-Malka, Reut, & Oshri, Odelia. (2024). The Weight on Her Shoulders: Marginalization of Women Legislators in Parliaments and Substantive Representation of Women. *British Journal of Political Science*, 54(4), 1-22. <https://doi.org/10.1017/s0007123424000401>
- Janis, Ilyana. (2022). Strategies for Establishing Dependability between Two Qualitative Intrinsic Case Studies: A Reflexive Thematic Analysis. *Field Methods*, 34(3), 240-255. <https://doi.org/10.1177/1525822x211069636>
- Kim, Nam Kyu. (2022). When does women's political power matter? Women's representation and legal gender equality of economic opportunity across contexts. *European Political Science Review*, 14(4), 583-599. <https://doi.org/10.1017/s1755773922000352>
- Lomazzi, Vera. (2023). The Cultural Roots of Violence against Women: Individual and Institutional Gender Norms in 12 Countries. *Social Sciences*, 12(3), 117. <https://doi.org/10.3390/socsci12030117>
- Martínez-Ariño, Julia. (2024). 'The Church is against us!' Feminist collective apostasies and the struggle for gender equality in Argentina and Spain. *Religion, State & Society*, 52(5), 535-553. <https://doi.org/10.1080/09637494.2024.2387488>
- Mechkova, Valeriya, & Edgell, Amanda B. (2023). Substantive Representation, Women's Health, and Regime Type. *Comparative Political Studies*, 57(14), 2449-2481. <https://doi.org/10.1177/00104140231204222>
- Parvez, Ayesha, Saleem, Javeria, Bhatti, Muhammad Ajmal, Hasan, Arshad, Ali, Zulfiqar, & Tauqeer, Tauseef. (2024). Boruta-driven analysis of telehealth amalgamation across healthcare stratifications with diffuse-dual-channel and tiered-gatekeeper systems. *Scientific Reports*, 14(1), 24784. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-76295-z>
- Rohrbach, Tobias. (2024). Are Women Politicians Kind and Competent? Disentangling Stereotype Incongruity in Candidate Evaluations. *Political Behavior*, 47(1), 411-434. <https://doi.org/10.1007/s11109-024-09956-4>
- Sanbonmatsu, Kira, Greene, Stacey, & Matos, Yalidy. (2025). The Political Implications of



- Identifying as a “Woman of Color” for Latina and Asian American Women. *The Journal of Race, Ethnicity, and Politics*, 1–30. <https://doi.org/10.1017/rep.2025.10026>
- Sawer, Marian. (2024). Feminist Institution Building: Political Science and *Politics & Gender*. *Politics & Gender*, 21(1), 119–125. <https://doi.org/10.1017/s1743923x24000382>
- Setiadi, Sandi, Alhidayatullah, & Maulana, Rizky. (2025). The Role of Collaboration in Overcoming MSME Challenges: Model Analysis to Improve Competitiveness and Sustainability. *International Journal of Science and Society*, 7(3 SE-Articles). <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v7i3.1520>
- Setiadi, Sandi, Maulana, Rizky, & Hidayat, Sarip. (2025). Dampak Pungutan Desa terhadap Aset dan Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Ilmu Manajemen Retail Universitas Muhammadiyah Sukabumi*, 6(2), 160–180. <https://doi.org/10.37150/jimat.v6i2.3732>
- Setiadi, Sandi, Widyastuti, Sri, Zulkifli, & Darmansyah. (2025). Sustainable nature tourism transformation: The strategic role of green tourism in West Java. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 9(3), 1544–1569. <https://doi.org/10.55214/25768484.v9i3.5599>
- Sevincer, A. Timur, Galinsky, Cindy, Martensen, Lena, & Oettingen, Gabriele. (2023). Political Ideology Outdoes Personal Experience in Predicting Support for Gender Equality. *Political Psychology*, 44(4), 829–855. <https://doi.org/10.1111/pops.12887>
- Tardos, Katalin, Paksi, Veronika, Takács, Judit, & Bencivenga, Rita. (2025). Gender Equality Plans in European Research Performing Organisations. *Social Inclusion*, 13. <https://doi.org/10.17645/si.11369>
- Wulandaria, Rafih Sri, Kartinib, Dede Sri, Alamsah D, Nandang, & Santosob, Eko Budi. (2024). Review of Affirmative Action Policy in West Java DPRD: challenges and Solutions of Political Parties in Achieving Women’s Representation. *Journal of Ecohumanism*, 3(7). <https://doi.org/10.62754/joe.v3i7.4676>
- Xydias, Christina. (2023). Why Theorizing and Measuring Shared Experience in Descriptive Representation Is “A Mess Worth Making.” *Politics & Gender*, 19(4), 1239–1244. <https://doi.org/10.1017/s1743923x22000551>
- Yin, Siyuan, & Sun, Yu. (2021). Intersectional digital feminism: assessing the participation politics and impact of the MeToo movement in China. *Feminist Media Studies*, 21(7), 1176–1192. <https://doi.org/10.1080/14680777.2020.1837908>
- Yulivestra, Malse, Zauhar, Soesilo, Wijaya, Andy Fefta, & Hidayati, Firda. (2025). Factors cause the failure of policy implementation of traditional customary governance system (Nagari) in West Sumatera Province, Indonesia. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 9(5), 1274–1281. <https://doi.org/10.55214/25768484.v9i5.7136>